

RUANG PUBLIK BARU DAN PERUBAHAN SOSIAL: PEMANFAATAN INTERNET UNTUK ADVOKASI DAN DISEMINASI ISU PENUNDAAN PEMILU STUDI KASUS MAFINDO DAN DRONE EMPRIT

Mila Amalia Rahman¹, Zahra Nur Afifah², Iza Ma'rifah³, Dewi Laras Lestari⁴, Gun Gun Heryanto⁵, Tantan Hermansah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: milaamalia.rahman@gmail.com

Naskah diterima tanggal 07-09-2023, direvisi tanggal 26-09-2023, disetujui tanggal 30-09-2023

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang isu penundaan pemilu tahun 2024 yang viral di media sosial. Menko Marves mengklaim 110 juta warganet mendukung penundaan pemilu 2024, berbeda dengan yang dibagikan Founder Drone Emprit 91% kontra dan 6% pro terhadap penundaan pemilu. Peneliti berfokus pada analisis advokasi dan diseminasi isu penundaan pemilu 2024 pada ruang publik baru. Penelitian terdahulu sepakat internet dapat menyebarkan informasi pemilu dan memengaruhi masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus pada twitter, peran Mafindo serta Drone Emprit dalam memetakan isu. Twitter sebagai media sosial menjelma ruang diskusi masyarakat tanpa batas, isu pemilu menjadi diskursus yang ramai dibicarakan. Tujuan penelitian ini mengetahui Twitter sebagai ruang publik baru dan perubahan sosial dimasyarakat terkait isu penundaan pemilu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan paradigma kritis. Peneliti menemukan perbincangan di twitter didominasi narasi kritik dan kontra terhadap penundaan Pemilu 2024, tidak hanya oleh publik, namun juga politisi, pakar hukum, pengamat dan petinggi partai. Munculnya tokoh mengadvokasi penundaan Pemilu 2024 tidak berpengaruh pada opini publik. Tipologi pengguna internet dalam hal ini termasuk dalam dua tipologi yaitu, tipologi *disseminator* dan *propagandis*.

Kata Kunci: ruang publik baru, perubahan sosial, penundaan pemilu 2024, *twitter*.

Abstract. *This research examines the issue of postponing the 2024 election which has gone viral on social media. The Coordinating Minister for Marves claims that 110 million netizens support postponing the 2024 election, in contrast to what the Founder of Drone Emprit shared: 91% are against and 6% are pro for postponing the election. Researchers focus on analyzing advocacy and disseminating the issue of postponing the 2024 election in new public spaces. Previous research agrees that the internet can disseminate election information and influence society, while this research focuses on Twitter and the role of Mafindo and Drone Emprit in mapping issues. Twitter as social media has become a space for unlimited public discussion, election issues have become a widely discussed discourse. This research aims to understand Twitter as a new public space and social changes in society related to the issue of election delays. Researchers use a qualitative approach and case studies, collecting data using interviews, observations, and literature studies, then analyzing and describing them using a critical paradigm. Researchers found that conversations on Twitter were dominated by narratives of criticism and opposition to the postponement of the 2024 elections, not only by the public but also by politicians, legal experts, observers, and high-ranking party officials. The emergence of figures advocating the postponement of the 2024 elections does not affect public opinion. In this case, the typology of internet users falls into two typologies, namely, disseminator and propagandist typologies.*

Keywords: *new public sphere, social change, postponing the 2024 General election, Twitter.*

PENDAHULUAN

Penundaan pemilu menjadi pembicaraan oleh pengguna twitter pada tahun 2021 dan 2022 bukan hanya dalam pemberitaan yang disampaikan oleh menteri Penanaman Modal dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pada siaran pers menyatakan bahwa para pengusaha mengusulkan penundaan pemilu 2024 (Saptohutomo, 2023). Namun Mantan ketua Umum Badan Pengusaha Pusat (BPP) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Erwin Aksara menolak permintaan tersebut (Farisa, 2023). Namun, isu penundaan pemilu ini juga membuat 2 lembaga yang mengusut kebenaran di media sosial seperti Drone Emprit dan Mafindo memberikan informasi tentang hal tersebut (Drone Emprit, 2023). Mereka memonitor serta menganalisa media sosial dan *platform online* yang berbasis teknologi big data untuk isu ini pada ruang publik baru. Isu ini pun mulai memuncak dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata Partai prima untuk menghentikan proses tahapan pemilu. Kemudian dikutip dari Kompas.com, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengklaim bahwa 110 juta warganet mendukung penundaan pemilu 2024 (Primadhyta, 2022). Hal di atas berbeda dengan data yang dibagikan oleh Ismail Fahmi selaku Founder dari Drone Emprit melalui akun twitter pribadinya, 91% bernada kontra dan 6% pro akan penundaan pemilu. Data fakta ini dihasilkan dari analisis isu penundaan pemilu yang dibicarakan oleh pengguna twitter (Fahmi, 2023).

Hal ini juga yang membuat *platform* Twitter sebagai salah satu media sosial yang menjelma bagai ruang diskusi masyarakat tanpa batas (Setiamukti & Nasvian, 2023), Kehadiran media baru telah memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus konsumen (*prosumer*), dan melahirkan konvergensi media sebagai adaptasi perubahan tersebut (Briandana, 2023). Ruang publik (*public sphere*) adalah suatu ruang yang dapat diakses tanpa adanya batas, bebas dari tekanan kekuasaan dan ekonomi, yang dimana warga negara membicarakan politik untuk mewujudkan suatu kesepakatan bersama yang berkaitan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Keberhasilan aktivis media digital tidak diukur dari pengaruh maupun kemampuan untuk membentuk gerakan dunia *offline* (Perdana et al., 2022). Berbeda dengan media mainstream yang memiliki peraturan dan batasan-batasan dan tidak jarang dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Dengan munculnya internet maka hadirlah *New Public Sphere* (Ruang publik baru). Ruang publik baru berakar dari hadirnya media baru yang menyebabkan persinggungan antara budaya populer atau disebut budaya baru dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat menggunakan jejaring sosial di internet, kita mungkin menghadapi berbagai macam masalah sosial, seperti kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap privasi, dan berbagai ekspresi terkait norma dan moralitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dikatakan bahwa budaya tidak mempengaruhi kehidupan kita, karena pada dasarnya semua yang kita lakukan diatur oleh budaya. Alasan mengapa ruang publik baru, budaya dan media baru bersinggungan adalah karena perkembangan media baru mulai membentuk budaya baru di masyarakat, salah satunya ruang publik baru hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Diskursus yang terjadi di ruang publik baru lebih bersifat bebas, terbuka, dan tanpa batas, sehingga terjadinya pergeseran budaya. Studi budaya pada media baru ini dikenalkan oleh Richard Hoggart, Stuart Hall and Raymond Williams yang tergabung di dalam Birmingham School (Kafle, 2009). Perbincangan tentang pemilu di twitter menjadi diskursus yang ramai dibicarakan khususnya menjelang pemilu seperti saat ini. Hal ini terjadi karena publik merasa lebih bebas untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Berbeda dengan ruang publik pada era sebelum adanya media baru, walaupun Habermas menegaskan bahwa ruang publik bersifat bebas, namun masih ada rasa takut dari masyarakat ketika bicara suatu tema yang dianggap tabu seperti politik. Hal ini menjadi bentuk pergeseran budaya lama menuju budaya populer pada media baru Twitter.

Twitter juga dapat termasuk ke dalam *New Public Sphere*, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran lebih aktif dan terlibat dalam proses pembentukan *opini publik* dalam mengambil keputusan politik. Bentuk ruang publik virtual di media baru (*net-based public sphere*), bisa diklasifikasi dalam lima kategori, yaitu: e-government, advocacy/activist domain, civic forums, parapolitical domain, dan journalism domain (Dahlgren, 2006). Artinya, ruang publik dalam media baru yang bersifat interaktif, global, dan konvergen dapat disebut *New public sphere* karena

memiliki fungsi yang sama dengan ruang publik. Twitter, Facebook, dan blog/website sebagai bentuk media baru paling tren menawarkan potensi untuk ruang interaktif tersebut. Saat ini, diskusi yang menekankan unsur interaktif ini terlihat pada kolom komentar yang tersedia baik pada website media, blog, Facebook, Twitter, maupun Youtube (Simarmata, 2014). Hal ini memungkinkan perubahan sosial dan politik yang lebih cepat dan demokratis, karena memberi kesempatan bagi suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar untuk diwakili dalam proses tersebut. Internet telah membawa perubahan sosial yang signifikan dalam aspek kehidupan termasuk dalam berkomunikasi. Dalam hal pemanfaatan internet untuk advokasi dan diseminasi, internet telah menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu kelompok dan individu untuk mencapai tujuan mereka, baik itu dalam mempromosikan isu sosial tertentu atau memobilisasi dukungan untuk tindakan tertentu.

Secepat penyebaran isu penundaan pemilu merupakan topik yang seringkali dibicarakan di media sosial terlebih Twitter. Beberapa pengguna Twitter yang mendiseminasi isu penundaan pemilu cenderung mengkritik keputusan penundaan tersebut dan mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. Salah satunya contoh pada akun Twitter @mohmafudmd dalam cuitannya "Vonis PN Jakpus ttg penundaan pemilu ke thn 2025 hrs dilawan, krn tak sesuai dgn kewenangannya". Sementara itu, ada juga pengguna Twitter yang mengadvokasi penundaan pemilu dengan alasan kesiapan infrastruktur yang belum memungkinkan untuk menggelar pemilu secara aman. Salah satu contoh pada cuitan "Penundaan pilpres tentu menjadi pilihan terbaik dalam keadaan seperti saat ini. Perlu ada kerja prioritas demi bangsa dan negara tercinta ini" dalam akun @Madawiboo. Twitter sebagai ruang publik baru, banyak pengguna dapat mendiseminasi informasi dan pandangan mereka terkait isu penundaan pemilu. Pengguna dapat *men-tweet* artikel berita, opini, analisis, dan pandangan mereka sendiri terkait penundaan pemilu.

Politikus Senior PDI Perjuangan menyebut kronologi usulan penundaan pemilu 2024 berawal dari unsur pemerintah yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dilansir dari BBC, gagasan penundaan pemilu 2024 yang tertangkap media, berawal sejak Januari 2022. Hal ini pertama kali diungkapkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ia mengutarakan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 31 Januari 2022. Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengutip sebuah survei di mana tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70%, dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha. "*Saya kan keliling indonesia, baik itu pengusaha besar, pengusaha kecil, dalam negeri maupun asing, karena mereka butuh stabilitas,*" kata Menteri Bahlil. Dilansir dari detikcom (Azmi, 2023).

Isu penundaan pemilu ini juga membuat 2 lembaga yang mengusut kebenaran di media sosial seperti Drone Emprit dan Mafindo memberikan informasi tentang hal tersebut. Seperti Drone Emprit merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan *platform online* yang berbasis teknologi big data (Drone Emprit, 2023). Drone Emprit sendiri menggunakan keahlian *Artificial Intelligence* dan *Natural Learning Process* (NLP). Drone Emprit mampu menyajikan peta Social Network Analysis 19 tentang bagaimana sebuah hoax berasal, menyebar, siapa influencers pertama, dan siapa groupnya.

Tidak jauh berbeda dengan Drone Emprit, Mafindo juga lembaga yang memberikan informasi seputar informasi yang memberikan hoax. Pada tahun 2016, MAFINDO, komunitas anti-hoax, menjadi lembaga nirlaba yang sah secara hukum. MAFINDO saat ini memiliki lebih dari 95.000 anggota daring, lebih dari 1.000 sukarelawan, dan lebih dari 20 cabang Indonesia. MAFINDO juga mempekerjakan tim profesional untuk melakukan pekerjaannya. Untuk memerangi infomedik dan hoaks, MAFINDO melakukan berbagai kegiatan, termasuk pembongkaran hoaks, edukasi publik, seminar, sarasehan, advokasi untuk berbagai pihak, pengembangan teknologi anti-hoaks, partisipasi masyarakat sipil, penelitian, dan riset. MAFINDO telah disertifikasi secara internasional oleh *International Fact Checking Network* (IFCN). Saat ini, ia telah bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional. Semua dilakukan MAFINDO dan jaringannya untuk turut membangun daya berpikir kritis di Masyarakat (Mafindo, 2023).

Isu penundaan pemilu ini dapat dikaji dengan teori Jurgen Habermas yang menempatkan gagasannya pada sesuatu yang umum, yaitu rasio manusia. Rasio dalam pandangan Habermas

adalah 'rasio yang memihak' yaitu rasio yang memiliki kepentingan emansipatoris atau pembebasan. Dimana, meskipun tidak menunjuk suatu golongan tertentu sebagai sasaran dalam masyarakat, rasio yang memihak itu akan menunjukkan siapa yang harus dibebaskan (Heller, 1982). Habermas berpendapat bahwa masyarakat berkembang menyangkut tiga dimensi pokok yaitu kerja, interaksi, dan kekuasaan (Sensat, 1979). Perkembangan (Habermas & Santoso, 2007) masyarakat juga menyangkut tiga macam rasionalisasi yaitu rasionalisasi teknis dalam dimensi kerja, rasionalisasi praktis dalam dimensi interaksi, dan rasionalisme sistem dalam dimensi kekuasaan (Littlejohn, 1999).

Konsep *public sphere* yang pada awalnya diperkenalkan oleh Habermas bermula dari esai yang berjudul "*The Structural Transformation of The Public Sphere*" esai tersebut menggambarkan kondisi Eropa abad ke-17 sebagai sebuah "ruang publik" yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, dimana publik bisa melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah (Habermas & Santoso, 2007). Konsepsi ruang publik pada dasarnya juga berarti suatu kawasan yang "netral" dimana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi pasar. Media massa merupakan sebuah *public spheres* sebuah ruang atau kawasan dimana publik bisa leluasa menikmati wacana yang demokratis dan rasional. Dengan demikian semestinya wilayah media tidak boleh diintervensi terlalu dalam oleh pemerintahan yang berkuasa, dan menjaganya dari penetrasi pasar yang berlebihan.

Habermas membedakan ruang publik (*Öffentlichkeit*) kedalam tiga jenis. Pertama, *Politische Öffentlichkeit* (ruang publik politik/politis); Kedua, *Literarische Öffentlichkeit* (ruang publik sastra/wilayah sastra/tulis menulis); dan ketiga *Repräsentative Öffentlichkeit* (perepresentasian/perwakilan masyarakat) (Habermas & Santoso, 2007). Adapun tujuan dari ruang publik (*public sphere*) yaitu menjadikan manusia mampu untuk merefleksikan dirinya secara kritis, baik secara politis-ekonomis maupun budaya (Heryanto, 2018).

Internet serta komunitas virtual menjadi media perantara terbentuknya struktur masyarakat yang bebas dominasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, perbincangan ruang publik secara *face-to-face* sudah bergeser, sehingga Mark Poster memberikan kritik pada Habermas dalam tulisannya *Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere* bahwa apa yang dikatakan Habermas tentang konsep *public sphere* sebagai ruang homogen dimana subyeknya mempunyai relasi simetrikal, telah terabaikan dalam arena publik elektronik (Heryanto, 2018).

Penelitian serupa yang relevan dengan penelitian ini salah satunya berjudul *The Relationship Of Political Socialization Messages Relations In Social Media Twitter With The Image Of PKS. (Study: Political Socialization PKS Through @PKSejahtera Account)* yang ditulis oleh Munadhil Abdul Muqsih tahun 2019. adanya hubungan yang signifikan, dengan temuan tertinggi terfokus pada korelasi antara pesan sosialisasi politik dan variabel persepsi dalam indikator citra politik (Muqsih, 2019). Temuan ini menggambarkan bahwa pesan yang disosialisasikan melalui platform Twitter memiliki dampak yang berarti terhadap pembentukan citra politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara sosialisasi pesan dan citra politik tetapi juga mengajukan pertanyaan dan arah untuk penelitian selanjutnya (Nasrullah, 2014).

Penelitian ini terkait dengan temuan dari penelitian Lukis Alam pada tahun 2009 yang berjudul "Influensi Media Internet terhadap Proses Pemilu di Indonesia," yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa internet dapat digunakan efektif untuk menyebarkan informasi pemilu dan memengaruhi masyarakat dengan lebih mudah. Kesesuaian dengan penelitian ini terletak pada fokus pemanfaatan internet dalam penyebaran isu pemilu, meskipun penelitian ini tidak terbatas pada ruang publik Twitter, berbeda dengan penelitian sebelumnya (Alam, 2009). Proses diseminasi ini juga perlu dilakukan pada media online, agar pemerataan terhadap proses diseminasi ini terus berlanjut. Salah satu kasus diseminasi adalah Namun beberapa diseminasi tatap muka kurang efektif dan efisien mengingat target audience yang kurang tepat (Adhitama, 2020) Pentingnya proses diseminasi informasi juga ditekankan, dengan penekanan pada media online agar pemerataan dalam proses diseminasi terus berlanjut. Selain itu, penelitian ini melibatkan tinjauan lebih lanjut terkait peran pihak ketiga,

seperti Mafindo dan Drone Emprit, yang dapat memberikan wawasan tambahan terkait pengaruh media internet pada isu pemilu. Dengan mempertimbangkan temuan sebelumnya dan melibatkan perspektif pihak ketiga, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pemanfaatan internet dalam konteks pemilu di Indonesia.

Penelitian terkait lainnya adalah "Analisis Sentimen Terhadap Isu Penundaan Pemilu di Twitter Menggunakan Naive Bayes Classifier." Penelitian ini menggunakan metode analisis Naive Bayes Classifier untuk mengetahui bagaimana masyarakat Twitter merespons isu penundaan pemilu setelah pernyataan Muhaimin. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 60.581 cuitan unik dengan sentimen positif, 58.998 cuitan unik dengan sentimen negatif, dan 32.291 cuitan unik menunjukkan sentimen netral (Perdana et al., 2022). Hubungan dengan penelitian ini, fokusnya adalah menganalisis penggunaan Twitter sebagai ruang publik untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Bedanya, penelitian ini tidak hanya menganalisis sentimen masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan peran Drone Emprit dan Mafindo. Mafindo berperan sebagai pengamat fakta yang memberikan klarifikasi terhadap isu, sementara Drone Emprit bertanggung jawab dalam diseminasi isu penundaan pemilu melalui pemantauan dan analisis Big Data di ruang publik Twitter.

Maka dari itu diperlukan media pencari fakta yang akurat dan terpercaya untuk memastikan kebenaran terkait isu-isu yang berkembang. Seperti yang dilakukan oleh Drone Emprit yang memanfaatkan internet untuk advokasi, diseminasi informasi, memantau dan melaporkan kecurangan pemilu dan politik Indonesia. Drone Emprit menggunakan teknologi seperti big data dan analisis sentimen untuk memantau serta menganalisa isu-isu politik yang muncul di media sosial agar lebih akurat kebenarannya. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis akan membahas mengenai Ruang Publik Baru dan Perubahan Sosial Budaya: Pemanfaatan Internet untuk Advokasi dan Diseminasi Isu Penundaan Pemilu Studi Kasus Mafindo dan Drone Emprit.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tanpa menggunakan prosedur statistik dan kuantitatif lainnya. Pendekatan ini dilakukan karena mempunyai ciri khas tersendiri yaitu penyajian datanya adalah berupa bentuk narasi, cerita mendalam atau merinci dari para responden hasil wawancara dan atau observasi (Hamidi, 2010). Penelitian ini juga menggunakan metode Studi Kasus Prospektif, yaitu jenis studi kasus diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus (Wahyuni, 2015). Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada isu penundaan pemilu yang terus berkembang di masyarakat sejak 2022 hingga maret 2023 di twitter, sehingga peneliti mengetahui sejauh mana isu yang beredar dapat memengaruhi masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapatnya. Tindak selanjutnya berupa penelitian tindakan (*Action Research*) yang dilakukan juga oleh pihak lain yang berkompeten. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi literatur seperti buku, jurnal dan internet. Pencarian data dilakukan dengan Paradigma kritis yang pada dasarnya berfokus pada analisis kritis terhadap kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan dalam masyarakat dan budaya (Horkheimer & Adorno, 2002).

Peneliti mengambil data dari hasil analisis Drone Emprit sehingga tidak diperlukan melakukan penghitungan statistik, dalam analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, adalah penelitian yang menggambarkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, baik kondisi yang terjadi maupun variabelnya (Bungin, 2007). Validasi data menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda (Afifuddin, 2009). Kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti masalah – masalah yang membutuhkan studi mendalam (Soejono & Abdurrahman, 2005). Prosedur yang dilakukan dalam studi kepustakaan adalah pemilihan topik penelitian, eksplorasi informasi, menentukan lokus penelitian, pengumpulan sumber data, membaca sumber data, membuat catatan penelitian, mengolah catatan penelitian dan menyusun artikel penelitian.

PEMBAHASAN

Data yang telah ditemukan dalam penelitian kemudian dianalisa menjadi hasil penelitian dan pembahasan terkait ruang publik baru dan perubahan sosial budaya, pemanfaatan internet untuk advokasi dan diseminasi isu penundaan pemilu studi kasus Mafindo dan Drone Emprit. Advokasi dan Diseminasi Isu Penundaan Pemilu 2024 pada Ruang Publik Baru. Diseminasi isu penundaan pemilu pertama kali terjadi tahun 2022 dan terus menjadi diskursus utama di ruang publik Twitter hingga bulan Maret 2023, kemudian isu ini kembali bergerak perlahan dengan volume perbincangan yang masih cukup tinggi. Salah satu penyebab isu ini sempat meredup hingga muncul kembali adalah ketika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024. Lebih jauh lagi, menimbulkan pertanyaan tentang kapabilitas hakim di Indonesia. Garis waktu diseminasi isu penundaan pemilu juga dikuatkan oleh pendapat salah satu informan yaitu Pak Nova selaku *Lead Senior Analyst* Drone Emprit:

"Awal itu tahun 2022, ramai tentang penundaan pemilu. Awalnya sih masa jabatan presiden 3 periode ya. Tapi penolakan publik cukup kuat di media sosial. Kelihatan banget penolakannya sangat kuat lalu berganti menjadi penundaan Pemilu, masa atau bahasanya bukan penundaan Pemilu di awal, tapi perpanjangan masa jabatan presiden 3 Periode. Dikabulkannya gugatan salah satu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Isu ini kembali naik penundaan Pemilu"

Beberapa tokoh penting ikut dalam diseminasi isu penundaan pemilu baik sebagai kelompok kontra maupun netral, diantaranya Pak Mahfud MD (@mohmahfudmd) dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (@SBYudhoyono). Tokoh penting dalam diskursus ini mengajak publik untuk menolak penundaan pemilu 2024, sehingga diskursus di Twitter didominasi oleh narasi kritik dan kontra yang tidak hanya dilakukan publik namun juga politisi, pakar hukum, pengamat, dan petinggi partai. Sesuai dengan teori ruang publik baru yang tidak ada batasan dalam diskusi atau asimetris.



Sumber: Twitter (2023)

Gambar 1. Tokoh yang terlibat dalam diseminasi Isu Penundaan Pemilu di Twitter

Diskursus publik di ruang publik baru Twitter juga melihat hal ini sebagai upaya perpanjangan masa jabatan Presiden sesuai dengan munculnya isu pertama yaitu tiga periode. Diseminasi isu penundaan pemilu tetap naik juga dibantu oleh penggunaan tagar di Twitter seperti #RakyatOgahTunda Pemilu dan #TolakTundaPemilu, hal ini didukung dengan pendapat dari Pak Nova, dan analisa Data Drone Emprit:

"menggunakan spesifik kata kunci tertentu ya jadi pencarian kami menggunakan kunci Pemilu dan pemilihan umum. Hanya mengandung kata penundaan perpanjangan tunda menunda, ditunda kayak gitu"

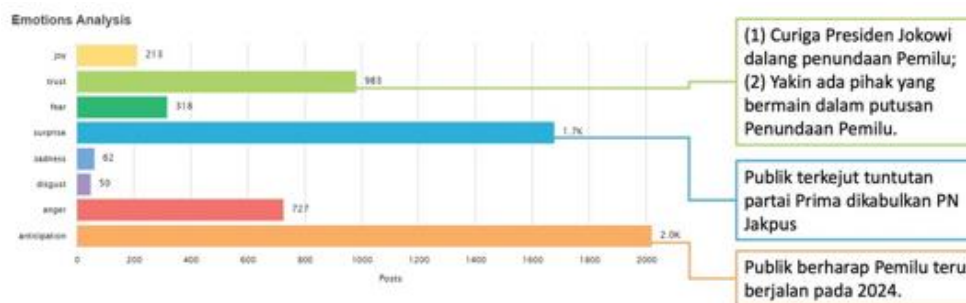
propagandis juga memberi informasi yang lebih kritis khususnya terhadap pemerintah yang dianggap tidak dapat diandalkan terutama dalam pengambilan keputusan, sehingga terciptanya sarkasme untuk menyindir pemerintah. Dalam pemanfaatan internet tentu tidak lepas dari adanya hoaks. Salah satunya hoaks yang menyebutkan bahwa pemilu ditunda hingga 2029 dan sudah dibantah oleh kominfo melalui laman resminya (KOMINFO, 2020).

Peran Mafindo dan Drone Emprit terhadap Isu Penundaan Pemilu di Ruang Publik Baru

Peran Mafindo dalam menghadapi isu penundaan pemilu ini dimulai sejak isu perpanjangan tiga periode. Dimana Mafindo sendiri berhasil melacak kosakata dalam hoax tiga periode. Pilihan kosakata dalam narasi hoaks tiga periode menunjukkan nilai eksperiental yang mengarah pada pandangan dan sikap politik tertentu. Mafindo berperan sebagai pengamat fakta dan pemberi klarifikasi apakah data atau isu yang beredar termasuk fakta atau hoaks. Cara kerja Mafindo yaitu pengumpulan data dan kemudian dianalisa kebenarannya melalui pihak terkait. Salah satu informan yaitu Pak Khairil selaku ex-Mafindo dan profesional pemeriksa fakta menuturkan bahwa terkait isu penundaan pemilu ini bisa dilihat apakah hoaks atau bukan ketika ada aduan dari masyarakat, sebagai berikut:

“pemeriksa fakta itu pekerjaannya profesi yang bekerja menangani informasi informasi yang diduga sebagai hoaks di masyarakat, khususnya di media sosial. Nah pertama kalau soal penundaan Pemilu ini kan by datanya kita belum tahu seperti apa jadi harus tunggu aduan.”

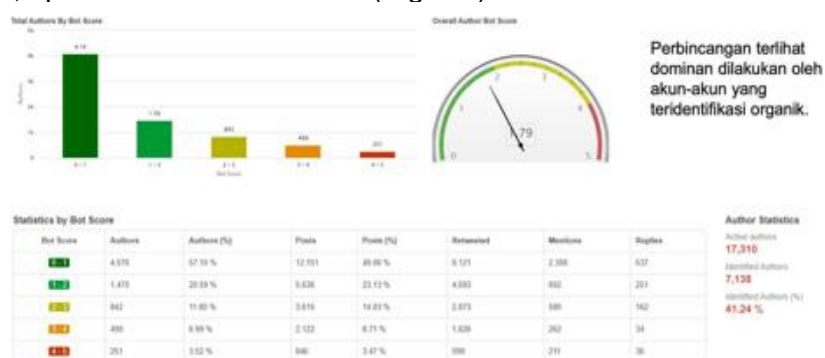
Peran Drone Emprit terhadap isu penundaan pemilu berdasarkan temuan peneliti adalah sebagai penghimpun data dalam ruang publik yang kemudian dianalisa. Salah satunya *emotions analysis*:



Sumber: Drone Emprit (2023)

Gambar 4. Analisa Drone Emprit terhadap Isu Penundaan Pemilu

Selain menganalisa *emotions*, Drone Emprit juga menganalisa akun-akun yang terlibat dalam ruang publik, apakah akun bot atau asli (organik).



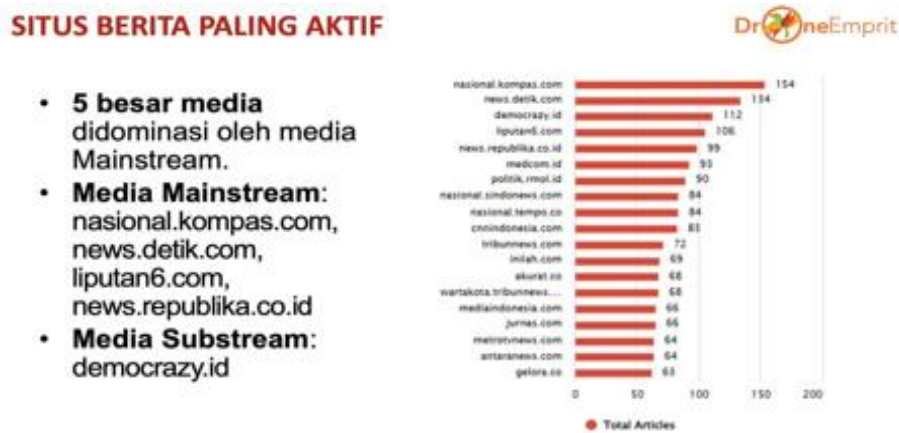
Sumber: Drone Emprit (2023)

Gambar 5. Analisa Drone Emprit terhadap Akun yang Berdiskusi

Cara Drone Emprit mengumpulkan data melalui diskursus di media sosial dan media online, namun tidak ke Tik Tok karena algoritmanya yang masih belum di pahami, hal ini divalidasi oleh Pak Nova selaku informan:

"Kami kumpulin dari media sosial juga dari media online. hampir semua media online yang terdaftar di Jurnalistik asosiasi jurnalistik Indonesia dewan pers yang terdaftar di dewan pers. kalau penundaan Pemilu itu kemarin yang kami pakai kata kuncinya adalah Pemilu dan pemilihan umum, kami mengamati media sosial Twitter, Facebook, dan belum ke TikTok"

Selain itu, Drone Emprit juga berpendapat bahwa perannya dalam ruang publik harus bisa bekerja cepat, karena informasi dan perbincangan di ruang publik baru sifatnya bergerak dengan cepat (Rahman, 2023). Adapun situs berita paling aktif yang di analisa oleh Drone Emprit adalah sebagai berikut



Sumber: Drone Emprit (2023)

Gambar 6. Situs Berita Paling Aktif Menurut Analisa Drone Emprit

Menurut Foundernya Drone Emprit berperan cukup besar dalam diseminasi isu penundaan pemilu. Melalui pemantauan dan pengamatan pada *Big Data*, Drone Emprit juga menghimpun dan menganalisa untuk mengetahui hasilnya dari diskursus di ruang publik baru Twitter. Perubahan sosial bisa disebut juga dengan *social movements*, berdasarkan temuan peneliti, dampak perbincangan tentang isu Penundaan Pemilu di ruang publik baru, menimbulkan gejolak gerakan aksi dari masyarakat di dunia nyata untuk penolakan isu tersebut. Berdasarkan tipologi dari *social movements* (Abrele, 1966). Gerakan sosial untuk penolakan Penundaan Pemilu berikut ini masuk ke dalam *Reformative Social Movements*, yang merupakan gerakan sosial untuk menginginkan perubahan pada segi-segi tertentu masyarakat. Namun jika dianalisa secara keseluruhan, peneliti berpendapat belum ada perubahan sosial budaya yang benar-benar signifikan, karena isu ini masih terus dimunculkan dan ditenggelamkan, sehingga untuk hasil akhir dari keputusan isu Penundaan Pemilu ini sendiri masih dalam tahap perbincangan.

Munculnya isu penundaan pemilu akibat putusan PN Jakarta Selatan membuat masyarakat ramai membicarakan isu tersebut di segala media, salah satunya Twitter. Diskursus publik yang terus dibicarakan dan berkembang akhirnya membentuk kesatuan opini publik yang menciptakan ruang publik, karena opini ini berkembang di media sosial twitter, maka diskursus terjadi di ruang publik baru (*new public sphere*). Kebebasan berpendapat di Twitter membuat munculnya dua kubu pro dan kontra terhadap isu tersebut. Hal ini menjadi semakin menarik karena isu ini tidak hanya dibicarakan oleh masyarakat biasa melainkan pejabat publik. Mafindo selaku organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan konten negatif dan hoaks ikut andil dalam diskursus ini untuk mencari kebenaran dalam isu yang berkembang luas. Ruang publik baru tidak memiliki batasan, sehingga siapa saja bebas berargumen terlepas dari isi argumen tersebut benar atau salah. Salah satu argumen pejabat publik yang menyebutkan bahwa lebih dari 80% masyarakat mendukung penundaan pemilu membuat Drone Emprit sebagai lembaga yang menggunakan Big Data mulai melakukan analisis terhadap pernyataan tersebut. Hal ini menjadi sebuah kesinambungan antara *New Public Sphere* di Twitter dan tanggapan Mafindo serta Drone Emprit terhadap isu tersebut.



Sumber: Twitter (2023)

Gambar 7. Gerakan sosial tentang tolak penundaan pemilu

KESIMPULAN

Diseminasi isu penundaan pemilu pertama kali terjadi sejak tahun 2022, kemudian sempat meredup hingga kemudian muncul kembali karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024, publik juga curiga bahwa Presiden Jokowi adalah dalang penundaan pemilu dan yakin ada yang bermain dalam putusan ini. Penyebaran isu penundaan pemilu juga dibantu oleh tagar di media sosial twitter seperti #RakyatOgahTundaPemilu dan #TolakTundaPemilu. Tokoh yang terlibat dalam diseminasi isu ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Mahfud MD. Perbincangan di media sosial twitter di dominasi oleh narasi kritik dan kontra terhadap penundaan Pemilu 2024 tidak hanya oleh publik, namun juga ada politisi, pakar hukum, pengamat, dan petinggi partai. Munculnya tokoh yang mengadvokasi penundaan Pemilu 2024 tidak berpengaruh pada opini publik yang berkembang.

Penggunaan internet pada saat ini membuat ruang publik juga menjadi *new public sphere*. Salah satu *new public sphere* yaitu media sosial twitter, yang menyebabkan seluruh lapisan masyarakat dan pengguna internet dapat ikut andil dalam diskursus yang terjadi secara asimetris. Tipologi pengguna internet dalam isu penundaan Pemilu 2024 ini termasuk dalam dua tipologi yaitu, tipologi *disseminator* yang lebih memberi argumentasinya tentang isu ini bisa tersebar, sedangkan tipologi *propagandis* memberikan informasi yang lebih kritis khususnya terhadap pemerintah yang dianggap tidak dapat diandalkan terutama dalam pengambilan keputusan yang dianggap sering merugikan publik, sehingga tipologi ini membuat sarkasme untuk menyindir pemerintah. Mafindo dalam isu Penundaan Pemilu 2024 berperan sebagai pengamat fakta dan pemberi klarifikasi apakah data atau isu yang beredar itu termasuk fakta atau hoaks, sedangkan Drone Emprit berperan dalam diseminasi isu penundaan pemilu. Melalui pemantauan dan pengamatan pada *Big Data*, Drone Emprit menghimpun dan menganalisa untuk mengetahui hasilnya dari diskursus di ruang publik baru Twitter.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrele, D. (1966). *A Classification Of Sosial Movement*. Aldine Publishing Aberle Co.
- Adhitama, S. (2020). Diseminasi Ketentuan Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut: Studi Kasus Manajemen Humas Ditjen Bea dan Cukai. *Jurnal Ekspresi Dan Persepsi*, 3.
- Afifuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Alam, L. (2009). Influinsasi Media Internet Terhadap Proses Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Semnasif*, 1.
- Azmi, F. (2023, March 6). *Romy PPP: penundaan Pemilu Sesuatu yang Sah dalam Demokrasi*. <https://www.Detik.com/Jatim/Berita/d-6603967/Romy-Ppp-Penundaan-Pemilu-Sesuatu-Yang-Sah-Dalam-Demokrasi>.

- Briandana, R. (2023). Media Baru dan dinamika konvergensi di Indonesia. *Publikasi Mercu Buana*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Dahlgren, P. (2006). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. *Taylor & Francis: Political Communication*.
- Drone Emprit. (2023, March 25). *Profil Drone Emprit*. <https://Pers.droneemprit.id/>.
- Fahmi, I. (2023). *Ismail Fahmi*. <https://Mobile.twitter.com/Ismailfahmi/Status/>.
- Farisa, F. C. ed. (2023, March 17). *Bahlil Ungkap Kronologi Pengusaha Ingin Tunda Pemilu 2024*. <https://www.Cnnindonesia.com/Ekonomi/20220111195650-92-745405/Bahlil-Ungkap-Kronologi-Pengusaha-Ingin-Tunda-Pemilu-2024>.
- Habermas, J., & Santoso, Y. (2007). *Ruang publik: sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis / Jurgen Habermas; penerjemah, Yudi Santoso*. kreasi Wacana.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian*. Malang UMM Press.
- Heller, A. (1982). (*Contemporary Social Theory*) John B. Thompson, David Held (eds.) - Habermas_ *Critical Debates-Macmillan Education UK (1982)* (J. B. Thompson & D. Held, Eds.). The McMillan Press. <https://doi.org/DOI.10.1007/978-1-349-16763-0>
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik* (D. A. Giddan & S. Rumar, Eds.). IRCiSoD.
- Heryanto, G. G., & Rumar, D. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). *Dialectic of Enlightenment*. Stanford University Press.
- Kafle, H. R. (2009). Media studies: Evolution and perspectives. *Bodhi An Interdisciplinary Journal*, 10–20.
- KOMINFO. (2020, June 25). (*DISINFORMASI*) *Pilpres 2024 Dibatalkan dan Ditunda Sampai 2029*. https://www.Kominfo.go.id/Content/Detail/27359/Disinformasi-Pilpres-2024-Dibatalkan-Dan-Ditunda-Sampai-2029/0/Laporan_isu_hoaks.
- Littlejohn, S. W. (1999). *Theories of Human Communication, third edition*. Wadsworth Publishing Company.
- Mafindo. (2023, March 25). *Profil MAFINDO*. <https://www.Mafindo.or.id/>.
- Muqsith, M. A. (2019). The Relationship Of Political Socialization Messages Relations In Social Media Twitter With The Image Of PKS. (Study: Political Socialization PKS Through @PKSejahtera Account). *Jurnal Ekspresi Dan Persepsi*, 2.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Perdana, A., Hermawan, A., & Avianto, D. (2022). Analisis Sentimen Terhadap Isu Penundaan Pemilu di Twitter Menggunakan Naive Bayes Clasifier. *Jurnal Sisfokom*, 11.
- Primadhyta, S. (2022, January 11). *Saat Luhut Klaim Ada 110 Juta Warganet Suarakan Penundaan Pemilu tapi Ogah Buka Datanya*. <https://Nasional.Kompas.com/Read/2022/03/17/06151661/Saat-Luhut-Klaim-Ada-110-Juta-Warganet-Suarakan-Penundaan-Pemilu-Tapi-Ogah>.
- Rahman, A. (2023, March 13). *Penundaan Pemilu*. <https://Pers.Droneemprit.id/Penundaan-Pemilu/>.
- Rosid, A. (2023, March 2). *Dukung Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu 2024, Arief Poyuono: Ini Baru Suara Tuhan*. <https://Banten.Tribunnews.com/2023/03/03/Dukung-Putusan-Pn-Jakarta-Pusat-Soal-Penundaan-Pemilu-2024-Arief-Poyuono-Ini-Baru-Suara-Tuhan>.
- Saptohutomo, A. (2023, March 8). *Jejak Isu penundaan Pemilu, Andil menteri dan Ketua Parpol hingga Gugat Partai Prima*. <https://Nasional.kompas.com/Read/2023/03/08/19540991/Jejak-Isu-Penundaan-Pemilu-Andil-Menteri-Dan-Ketum-Parpol-Hingga-Gugatan>.
- Sensat, J. (1979). *Habermas and Marxism*. Sage Publication.
- Setiamukti, M., & Nasvian, M. (2023). Social Net Work Analisis #Usuttuntas Pada Media Sosial Twitter. *Jurnal Ekspresi Dan Persepsi*, 6.

- Simarmata, S. (2014). Media baru, ruang publik baru, dan transformasi komunikasi politik di Indonesia. *Jurnal Interact*.
- Soejono, & Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. PT. Asdi Mahasatya.
- Wahyuni, S. (2015). *Qualitative Reseach Method Theory and Practice*. Salemba Empat.